

...naahi dengan pelantikan H
:: DEWAN PERTANYAKAN PERWAKO 24/2017

Ketua RT/RW Dilarang Aktif di Parpol

BATAM KOTA - Anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho mempertanyakan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 24 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut dinilai bahwa ada larangan bagi perangkat RT dan RW dilarang berasal dari partai politik (Parpol), sehingga hal ini dikhawatirkan akan menjadi polemik menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang.

"Ini bisa menjadi keresahan masyarakat menjelang pemilu. Karena selama ini tidak ada masalah. Sehingga saya kira pemerintah perlu menjelaskan terkait dengan aturan ini," ujarnya di



DOK SINDO

UDIN P SIHALOHO
Anggota DPRD Batam

DPRD Batam, Senin (26/2).

Menurut dia, saat ini Batam belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait dengan mekanisme pemilihan Ketua RT dan RW.

Ke hal 12)))

Ketua RT/RW...

(((Dari hal 9

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan, juga tidak ada aturan yang melarang seperti apa yang diatur dalam Perwako tersebut.

Karena itu pihaknya menilai permasalahan ini perlu penegasan dari Pemko Batam, pasalnya tidak sedikit ketua RT dan RW yang juga menjabat sebagai

pengurus partai dan beberapa di antaranya menjadi anggota DPRD Batam. Sementara dalam pemilihannya memang murni dipilih oleh masyarakat di lingkungan RT dan RW masing-masing. "Selama ini tidak ada masalah kok meskipun pengurus aktif di parpol. Itu sebabnya kami pertanyakan masalah ini," kata Udin.

Pihaknya tidak ingin setelah ada Perwako yang dikeluarkan ini oleh Wali Kota Batam malah

menjadi polemik di masyarakat. Karena jabatan RT dan RW merupakan hasil dari muaswarah dan mufakat, sehingga dia berpendapat tidak akan menjadi persoalan selama disetujui oleh dan dipilih oleh masyarakat.

Terlebih lagi aturan di atasnya dalam Permendagri juga tidak ada larangan terkait hal itu. Udin juga berharap pimpinan DPRD Batam bisa mempertanyakan secara resmi kepada Pemko Batam terkait hal ini.

Sebab jangan sampai saat pesta demokrasi yang akan digelar tahun 2019 mendatang terjadi masalah-masalah yang memang tidak seharusnya terjadi karena kebijakan tersebut.

"Ini harus dibahas di Komisi I DPRD Batam bidang hukum, saya juga sudah menyampaikan terkait hal itu dalam Paripurna," tegasnya.

Wakil Wali Kota Batam Am-sakar Achmad mengatakan pihaknya akan segera menindak-

lanjuti pertanyaan yang disampaikan oleh anggota DPRD Batam tersebut. Pasalnya selama ini memang tidak ada masalah meskipun ada beberapa RT dan RW menjabat sebagai anggota DPRD Batam atau aktif di parpol.

"Sampai sejauh ini tidak ada informasi permasalahan ini, mungkin tempat Pak Udin masalah. Tapi saya akan rapatkan dengan bidang hukum Pemko Batam," ujarnya.

● **ahmad rohmadi**

BP Hibahkan 669 Ruas Jalan

Dukung Pemko Batam Bangun Infrastruktur

BATAM KOTA – Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung penuh program Pemko Batam dalam pembangunan infrastruktur. Saat ini ada 669 ruas jalan yang masih tercatat sebagai aset milik BP Batam, segera dihibahkan seluruhnya kepada Pemko Batam.

Dengan hibah aset ini diharapkan Pemko Batam bisa mengeluarkan anggaran untuk melaksanakan proyek pelebaran jalan. "Sambil menunggu proses hibah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kami akan pinjam pakai kan kepada Pemko Batam," kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo us-

ai menggelar pembahasan aset di Pemko Batam, Senin (26/2).

Dia menjelaskan, pihaknya juga sepakat bahwa untuk pembangunan jalan sepenuhnya akan diserahkan kepada Pemko Batam. Sedangkan BP Batam akan fokus terhadap pembangunan infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan.

"Sambil menunggu proses hibah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kami akan pinjam pakai kan kepada Pemko Batam"

LUKITA DINARSYAH TUWO
Kepala BP Batam

Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi timpang tindih kewenangan seperti yang selama ini terjadi.

Ke hal 12))

BP Hibahkan...

«Dari hal 9

Lukita menyatakan, dirinya bersama dengan Wali Kota Batam akan segera menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait dengan pinjam pakai tersebut. Setelah itu Pemko Batam bisa melaksanakan pelebaran di ruas titik jalan yang selama ini sudah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2018. "Pemko Batam kan tidak mungkin menunggu sampai proses hibah selesai, karena itu kami pinjam pakai," ujarnya.

Ia juga menjamin tidak akan ada persoalan hukum terkait dengan status pinjam pakai

nantinya. Lukita juga menegaskan bahwa pada dasarnya proses administrasi hibah tidak ada kendala di BP Batam. Hanya saja memang persetujuan hibah aset sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kemenkeu.

Begitu juga termasuk dengan proses hibah aset secara keseluruhan, untuk tahap pertama ini masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Kemudian untuk tahap kedua dalam proses persetujuan oleh Kemenkeu. Sementara untuk aset lainnya masih diselesaikan adminis-

trasi di BP Batam. "Tapi pada dasarnya kami komitmen bahwa aset yang berkaitan dengan fasilitas umum untuk masyarakat akan dihibahkan ke Pemko Batam," jelasnya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menambahkan, pertemuan dengan pimpinan BP Batam adalah untuk membahas pemanfaatan aset. Pihaknya sudah sepakat melaksanakan MoU terkait dengan pemanfaatan aset jalan yang di Kota Batam. Karena saat ini masih tercatat sebagai aset BP Batam.

"Saya sama Pak Lukita duduk bersama untuk mencocokkan apa yang menjadi rencana pembangunan ke Batam, salah satu-

nya terkait dengan jalan. Kami sepakat MoU mana-mana yang menjadi ROW jalan yang akan diselesaikan," kata Rudi.

Baik Pemko Batam dan BP Batam sudah memiliki aturan dan tugas masing-masing, sehingga pihaknya juga menyambut baik proses hibah aset yang sudah disepakati. Tahun ini Pemko juga akan melebarkan 10 titik ruas jalan di Kota Batam.

Seperti diketahui, tahun ini Pemko Batam melebarkan sepuluh ruas jalan di kawasan Nagoya dan Batam Centre. Untuk wilayah Batam timur, Rudi menargetkan pembangunan jalan selesai pada 2019. Pemko Batam juga mulai melebarkan

di wilayah Batam barat. Seperti jalan dari Simpang Princess Tiban I Sekupang. Jalan lurus ke arah laut di Tiban ini sebagai persiapan rencana pembangunan ring road ke arah Tanjungguma, Jodoh.

Sementara jalan lain yang akan diperbesar tahun 2019 yakni di depan Kantor Camat Batuaji, Kepri Mall ke Panbil Mall di Mukakuning, Seibeduk dan dari Citra Batam ke Yos Sudarso. Kemudian dari Patung Kuda Seipanas ke Simpang Bengkong Seken, serta Bengkong Bengkel sampai ke Bengkong Laut.

● **ahmad rohmadi/
m arief rachman/
hendra zaimi**

Batam Minta Pusat Buka Impor Beras

BATAM KOTA – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, Pemko Batam telah mengajukan permohonan pembukaan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan mengingat kini harga di pasaran mahal. "Wali Kota sudah meminta ke Kementerian agar dibuka impor di sini," ujarnya, kemarin.

Harga beras di pasar-pasar terlalu tinggi. Beras kualitas medium rata-rata Rp14.000 per kg, di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Menurut dia, bila impor beras dilakukan, maka dapat menekan harga. Selain harga dari negara asal lebih murah, ongkos distribusinya juga lebih sedikit ketimbang membawa

"Impor salah satu alternatif. Tapi itu tidak mudah. Impor dilakukan secara hati-hati,"

GUSTI RAIZAL EKA PUTRA

Kepala BI Kepri

beras dari Pulau Jawa.

Dalam rapat Tim Pengendali Infasi Daerah (TPID), BPS menjabarkan angka pertumbuhan ekonomi Batam pada Januari sebesar 2,01 persen. Namun inflasinya mencapai 4,46 (yoy). Dengan begitu, terdapat kesenjangan lebih dari 2 persen antara pertumbuhan ekonomi de-

ngan inflasi. "Ini menggambarkan daya beli masyarakat kita rentan," kata Amsakar.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan harga beras di Batam tinggi karena harga di daerah penghasil juga meningkat. Selain itu, harga beras juga dipengaruhi biaya distribusi yang juga tinggi. "Impor salah satu alternatif. Tapi itu tidak mudah. Impor dilakukan secara hati-hati," katanya.

Menurut dia, TPID perlu menyusun neraca pangan yang akurat agar pemerintah daerah mudah membuat kebijakan dan mengambil tindakan. "Karena volatile food menjadi faktor penyumbang inflasi pada umumnya," kata Gusti.

Selama Sukajadi Expo, sambutan, pihaknya juga akan me-

kan, sebelum dibangun, pengembang sudah

DISDUKCAPIL IMBAU WARGA DATANGI KECAMATAN

Pencetakan E-KTP Batuaji Rampung

SEKUPANG - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam telah merampungkan pencetakan pengajuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Batuaji. Warga diimbau untuk memeriksa e-KTP miliknya di Kantor Camat Batuaji.

Kepala Bidang Pelayanan Disdukcapil Batam Muhammad Teddy Nuh mengatakan, warga Kecamatan Batuaji diharapkan segera memeriksa e-KTP yang sudah sejak lama diajukan. Hal ini agar proses pengajuan yang baru dapat dicetak juga. "Karena yang saat ini menjadi prioritas adalah pengajuan e-KTP yang sudah lama,

Bagi pengajuan baru akan dicetak segera mungkin," ujarnya, Senin (26/2).

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu Disdukcapil baru menerima 10.000 blangko e-KTP yang akan dialokasikan ke Kecamatan Batam Kota. Karena masih dalam proses pencetakan, maka saat ini warga dimohon untuk menunggu.

"Pencetakannya akan dilakukan secepat mungkin, agar kami dapat menyelesaikan permohonan dari kecamatan lain," kata Teddy.

Saat ini Disdukcapil Batam telah menyelesaikan permohonan e-KTP di enam kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada. Di antaranya Bulang, Galang

dan Belakangpadang untuk wilayah hinterland. Sedangkan di wilayah mainland yaitu Batuampar, Nongsa dan Batuaji. "Proses pencetakan kami kebut, karena jika e-KTP sudah dicetak, maka Disdukcapil dapat meminta blangko ke Jakarta," katanya.

Bahkan, sambungnya, saat ini stok blangko e-KTP melimpah, sehingga ditargetkan sebelum 2018 berakhir, seluruh permohonan e-KTP sudah selesai dicetak.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Kota Batam Said Khaidar mengatakan dalam dua pekan ke depan pihaknya akan mengajukan kembali permohonan blangko kartu tanda

penduduk elektronik (e-KTP) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini dilakukan secara bertahap dan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pencetakan e-KTP di 12 Kecamatan yang ada di Batam. Menurut dia, Kamis (15/2) lalu sudah datang seki-

tar 10 ribu yang diserahkan Disdukcapil ke Kecamatan Batam Kota untuk segera masuk proses. "Totalnya memang ada sekitar lima ribu yang belum cetak di sana, kami akan segera mengajukan ke Kemendagri," ujarnya, Senin (19/2). Disdukcapil akan men-

gajukan permintaan 60 ribu blangko e-KTP, namun pemberiannya akan tergantung di Kemendagri. Oleh sebab itu, proses percepatan pun dikejar oleh Disdukcapil dengan cara menyelesaikan satu persatu persoalan e-KTP yang tertunda di Kecamatan.

"Untuk Kecamatan Batuaji dan Batuampar sudah selesai, sekarang kami sedang targetkan untuk Batam Kota. Secara bertahap akan diselesaikan dan akan siap sebelum akhir tahun 2018," katanya.

● fathurohim/
hendra zaimi

Presented by

BATAM ECONOMIC FORUM
CONNECTING INDONESIA - BATAM & NEPI

INDONESIA ECONOMIC FORUM
UNDERSTANDING INDONESIA
Regional Sales - CONNECTING
INDONESIA - BATAM & NEPI

THE FUTURE OF BATAM
CREATING
A REGIONAL HUB
LOGISTICS | DIGITAL | HI-TECH | TOURISM

Radisson Hotel & Convention Center, Batam
TUESDAY
FEB 27,
2018

Beberapa Import Beras